

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abuyamin DR. Oyok, 2010, *Perpajakan Pusat dan Daerah*, Humaniora, Bandung
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Brotodiharjo R. Santoso, 2003 (cetakan pertama edisi keempat), *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2000, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai*, Departemen Keuangan
- Fajar ND., Mukti, Achmad, Yulianto, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Hamzah Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ibrahim Johny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya
- Judisseno Rimsky K., 1997, *Perpajakan*, PT Gramedia, Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2002, Balai Pustaka, Jakarta
- Mardiasmo, 2003 (edisi revisi), *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta
- Prasetyo Bambang dan Lina Miftahul Jannah, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Pudyatmoko Y. Sri, 2009, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta
- Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Suandy Erly, 2002, *Hukum Pajak*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Waluyo, Wiryawan B. Ilyas, 2003, *Perpajakan Indonesia: Pembahasan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*, Salemba Empat, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Jawa Tengah

C. Jurnal

Surono, 2013, “Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau 2013 : Sinergi Dalam Roadmap Industri Hasil Tembakau”, Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta

D. Internet

<http://www.muriaexpose.com/2015/02/dbhcht-dana-spesifik-penggunaanya-juga.html> diakses pada tanggal 16 Februari 2016 pukul 22.25 WIB